

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BONE  
TAHUN 2023



# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**KABUPATEN BONE  
TAHUN 2023**

<https://bonekab.bps.go.id>



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONE 2023

Katalog BPS : 4102002.7311  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : x + 36 halaman  
Nomor Publikasi : 73110.24011

Naskah/Editor :  
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :  
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan dan Dicitak Oleh :  
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Sumber Ilustrasi :  
Canva

***Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/  
atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan  
Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.***

**TIM PENYUSUN**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN BONE  
2023**

**Penanggungjawab Umum :**  
Muhammad Asri Lantong

**Penyunting :**  
Syahrani Saleh  
Mochammad Nafi' Dzakwan

**Penulis :**  
Karina Rizki Novita

**Pengolah Data :**  
Mochammad Nafi' Dzakwan  
Karina Rizki Novita

**Gambar Kulit :**  
Karina Rizki Novita



Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen data statistik yang semakin kompleks, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menerbitkan berbagai publikasi termasuk publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone 2023. Publikasi ini memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM beserta komponen-komponennya di Kabupaten Bone pada tahun 2023.

Ada tiga tujuan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Indikator bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat tersebut kemudian dicakup dalam indeks komposit perhitungan IPM.

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik di masa mendatang.

Watampone, Juli 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik

**Muhammad Asri Lantong**

# Daftar Isi

i	HALAMAN JUDUL
ii	KATALOG
iii	TIM PENYUSUN
v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR GAMBAR
ix	DAFTAR TABEL
1	<b>BAB I</b>
	<b>PENDAHULUAN</b>
3	1.1. Latar Belakang
5	1.2. Tujuan Penulisan
6	1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data
6	1.4. Sistematika Penulisan
7	<b>BAB II</b>
	<b>METODOLOGI</b>
10	2.1. Konsep dan Definisi Indeks Pembangunan Manusia
14	2.2. Sumber Data
15	<b>BAB III</b>
	<b>GAMBARAN UMUM</b>
17	3.1. Letak Geografis
18	3.2. Kependudukan
20	3.3. Ekonomi PDRB
22	3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
22	3.5. Trend APBD
23	<b>BAB IV</b>
	<b>KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA</b>
26	4.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia
29	4.2. Indeks Pembangunan Manusia

# Daftar Isi

33	⋮	BAB V
	⋮	KESIMPULAN DAN SARAN
35	⋮	5.1. Kesimpulan
36	⋮	5.2. Saran
	⋮	
37	⋮	DAFTAR PUSTAKA

<https://bonekab.bps.go.id>



# Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia
- 17 : Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bone

<https://bonekab.bps.go.id>

# Daftar Tabel

11	Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam perhitungan
13	Tabel 2.2	Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
21	Tabel 3.1	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2019-2023
30	Tabel 4.1	Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

<https://bonekab.bps.go.id>

<https://bonekab.bps.go.id>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

<https://ibonkhalidps.go.id>



## 1.1. Latar Belakang

Dalam realitas pembangunan, ternyata pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, memunculkan pemikiran tentang perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi, yang memperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan. Perkembangan pemikiran tentang pembangunan (paradigma) bila dilihat mulai pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai media untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Adanya pergeseran-pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan terjadinya penyesuaian pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat

manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat rata-rata lama sekolah.

Perlunya mengukur paradigma pembangunan manusia menyebabkan berkembangnya berbagai ukuran dalam mengukur keberhasilan pembangunan, sejak tahun 1990 *United Nations Development Program* (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dinilai dengan membandingkan hasilnya antar waktu atau antar wilayah. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bone, meskipun pada tahun 2014 mengalami perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peningkatan produksi (pertumbuhan ekonomi) tidak dapat berjalan sendiri, bergantung pada distribusi pendapatan penduduk dan prioritas belanja pemerintah. Untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pendidikan perlu perbaikan standar hidup penduduk yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan tidak kalah pentingnya adanya partisipasi pihak swasta dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara ringkas dapat dilihat pada gambaran berikut:



**Gambar 1.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Bone 2020

## 1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone Tahun 2023 disusun dengan menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini disebut komposit karena telah mencakup indikator di bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat.

Tujuan penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 Kabupaten Bone adalah

- Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.
- Sebagai sumber informasi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
- Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor



program pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan dapat ditentukan.

### **1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data**

Ruang lingkup dalam pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone tahun 2023 hanya mencakup wilayah kabupaten dan tidak terinci sampai wilayah kecamatan. Cakupan tersebut disebabkan oleh keterbatasan besarnya sampel dan ketersediaan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019-2023 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone 2019-2023 seri tahun dasar 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, serta sumber lain yang relevan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan indeks pembangunan ini meliputi: bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Kemudian bab dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Bone yang diuraikan atas letak geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB) potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dan trend alokasi APBD. Kemudian Bab empat membahas mengenai kinerja pembangunan manusia melalui angka IPM bersama komponen-komponennya. Bab lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

# **BAB 2**

# **METODOLOGI**

<https://ibidokanps.go.id>



Pemerintah tetap konsisten untuk berupaya mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Informasi tersebut, sangat penting untuk evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan awal untuk melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Informasi tentang keberhasilan pembangunan yang dicapai, dapat dilihat dari berbagai ukuran termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur yang sifatnya kuantitatif, selalu di mulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam publikasi ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang digunakan dalam penyusunan buku ini.

## 2.1. Konsep dan Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup ( $e_0$ ), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Dimana :  $I_{\text{pendidikan}} = 1/2$  (indeks harapan lama sekolah) +  
 $1/2$  (indeks rata-rata lama sekolah)

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}}$$

Dimana  $X_{(i)}$  : Indikator ke-i ( $i=1,2,3$ )

$X_{(i)\text{maks}}$  : Nilai maksimum  $X_{(i)}$

$X_{(i)\text{min}}$  : Nilai minimum  $X_{(i)}$

**Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam perhitungan**

Indikator	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone 2020

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan usia harapan hidup (*life expectancy at Age 0;  $e_0$* ), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/ MYS*) dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *purchasing power parity*/paritas daya beli. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan pendekatan pengeluaran perkapita penduduk.

### 2.1.1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel  $e_0$  dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan Um Harapan Hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

### 2.1.2. Harapan Lama Sekolah

Terdapat perubahan komponen penghitungan dimana pendekatan sebelumnya menggunakan indeks angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas, dirubah menjadi indeks harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Perubahan tersebut mengikuti perubahan penghitungan, metodologi penghitungan oleh UNDP pada tahun 2010.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$FK$  = Faktor Koreksi Pesantren

$E_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t

$i$  = Penduduk usia (a,a+1,...,n)

### 2.1.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LS_i}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Dimana :

MYS = rata lama sekolah (dalam tahun)

$f_i$  = frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan  $i$ .

$S_i$  = skor masing-masing jenjang pendidikan  $i$ .

$LS_i$  = 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)

$LS_i$  =  $S_i$  (bila tamat)

$LS_i$  =  $S_i$  + kelas yang diduduki - 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)

$LS_i$  = kelas yang diduduki - 1 (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)

$i$  = jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10);

**Tabel 2.2 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)**

Jenjang Pendidikan (1)	Skor (2)
Tidak Punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone 2020



### 2.1.3. *Purchasing Power Parity (PPP)*

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai *Purchasing Power Parity (PPP)* yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Selain itu, ada penambahan jumlah komoditas yang dikonsumsi semula 27 komoditas menjadi 96 komoditas dengan perincian 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana :

- $p_{ik}$  = harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan
- $p_{ij}$  = harga komoditas  $i$  di kabupaten/kota  $j$
- $m$  = jumlah komoditas

## 2.2. **Sumber Data**

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, 2022 dan 2023. Laporan ini menyajikan indikator atau data basis berupa data yang dihasilkan dari Kor Susenas 2021, 2022 dan 2023 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan sebagai pelengkap ulasan yang disajikan, sebagian data bersumber dari hasil pendataan yang dikumpulkan oleh berbagai instansi yang terkait, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

# **BAB 3**

## **GAMBARAN UMUM**

<https://ibidokanops.go.id>

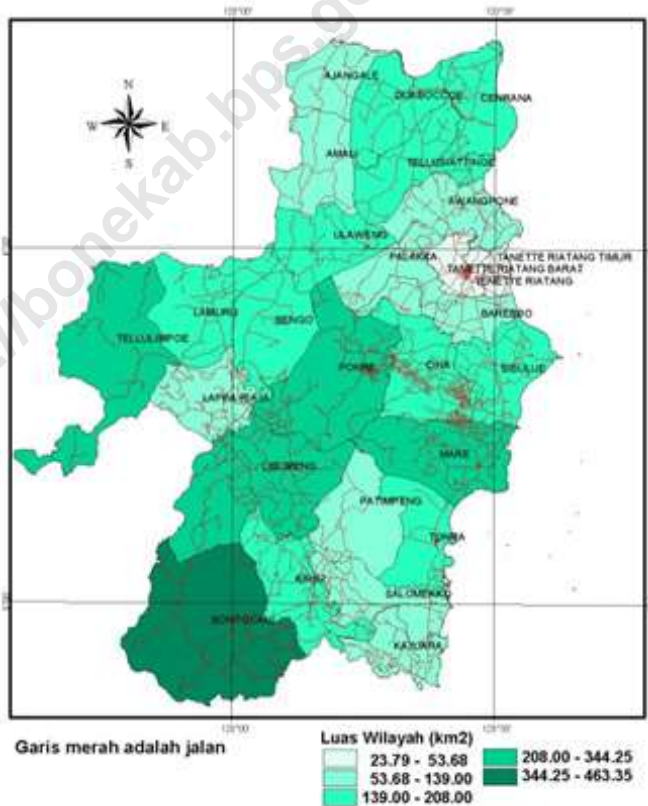


# BAB III

## Gambaran Umum

### 3.1. Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bone

Secara astronomis terletak pada posisi  $4^{\circ}13'-5^{\circ}06'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}42'-120^{\circ}40'$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dengan Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah sekitar  $4.559,00 \text{ km}^2$ . Daerah ini terdiri dari 27 kecamatan dengan 372 desa/kelurahan. Berdasarkan ketinggian tempat, maka wilayah dengan ketinggian 0-100 m terdapat 39,88 persen, ketinggian 101-500 m terdapat 45,09 persen, ketinggian 501-1000 m terdapat 12,70 persen, dan ketinggian 1.001 m ke atas terdapat 2,34 persen.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 69,7% - 84,4% dengan temperatur berkisar  $27,4^{\circ} \text{C}$  -  $29,3^{\circ} \text{C}$ . Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di Wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata  $< 1.750 \text{ mm}$ ;  $1750-2000 \text{ mm}$  dan  $2500-3000 \text{ mm}$ .

### **3.2. Kependudukan**

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SP2020, Penduduk Kabupaten Bone tahun 2022 terdapat 816.010 jiwa, naik pada tahun 2023 menjadi 823.080 jiwa yang terdiri dari 402.630 laki-laki dan 420.450 perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bone pada Tahun 2023 sekitar 95,76 yang berarti terdapat sekitar

95 hingga 96 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki di daerah ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah karena belum dilakukan penelitian, akan tetapi berdasarkan data kelompok umur menunjukkan persentase penduduk laki-laki yang lebih kecil daripada perempuan pada kelompok umur usia produktif yaitu yang berumur 15-64 tahun. Hal ini diduga bahwa banyaknya penduduk laki-laki pada usia produktif yang mempunyai kegiatan di daerah lain, baik untuk mencari nafkah, melanjutkan sekolah maupun kegiatan lainnya. Selain itu laki-laki di Kabupaten Bone juga menunjukkan tingkat harapan hidup yang lebih rendah dibanding perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2023 sebesar 0,87 persen. Pertumbuhan penduduk di daerah ini harus tetap menjadi perhatian agar selalu terkendali. Hal ini karena banyak pihak yang menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan penduduk dibanding dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan hanya untuk konsumsi penduduk, sehingga proporsi anggaran untuk pembangunan semakin menurun.

Pertumbuhan penduduk yang positif muaranya akan memperluas lahan hunian, sehingga mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Bone yaitu dari 178 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022, dan pada 2023 naik menjadi 180 penduduk/km<sup>2</sup>. Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menambah beban pembiayaan dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Namun demikian, jika diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, perbaikan ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk dapat terantisipasi dengan baik.

Dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), ternyata di Kabupaten Bone pada tahun 2023, APS untuk usia sekolah dasar atau 7-12 tahun mencapai 99,28 persen, dengan perincian APS laki-laki 98,70 persen dan APS perempuan 100,00 persen. Selanjutnya APS usia SLTP atau usia 13-15 tahun yaitu 92,36 persen lebih tinggi APS perempuan (97,32 persen) dari pada APS laki-laki (86,59 persen). Untuk usia SLTA atau usia 16-18 tahun APSnya 71,43 persen dengan perincian laki-laki 63,86 persen, dan perempuan 79,86 persen. Berdasarkan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa makin tinggi kelompok umur usia pendidikan, maka APS-nya semakin rendah.

### **3.3. Ekonomi PDRB**

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Sedangkan harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan Tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 3,77 persen melambat jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,23 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Bone dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2023, peranan Lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Bone masih menjadi yang terbesar yakni sebesar 48,36 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 48,61 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh lapangan usaha tanaman pangan dan perikanan yang pada tahun 2023 memiliki kontribusi masing-masing sebesar 24,19

persen dan 24,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan dan perikanan.

**Tabel 3.1 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2019-2023**

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (persen)	PDRB ADH Konstan 2010 (Juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	36.034.839,17	8,80	22.108.038,47	7,01
2020	36.560.640,40	1,46	22.053.740,20	-0,25
2021	39.369.964,17	7,68	23.273.868,47	5,53
2022 <sup>*)</sup>	43.640.843,99	10,85	24.491.730,02	5,23
2023 <sup>**)</sup>	46.935.170,81	7,55	25.416.033,22	3,77

\*) Angka sementara    \*\*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Lapangan usaha lain yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bone adalah lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,45 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 11,00 persen, dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 7,05 persen. Sebaliknya yang paling kecil kontribusinya adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu hanya 0,03 persen.

Penghitungan PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB atas harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. Hasil olahan menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Kabupaten Bone meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar Rp.47.810.970,- kemudian turun pada tahun 2020 menjadi Rp.45.683.840,- lalu secara berturut-turut terus naik menjadi Rp.48.800.699,- pada tahun 2021, sebesar Rp. 53.666.365,- pada tahun 2022 dan mencapai Rp. 57.023.900,- pada tahun 2023.



Angka tersebut bukan merupakan penerimaan secara riil merata di semua penduduk, tetapi menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

#### **3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kondisi geografis Kabupaten Bone menggambarkan suatu wilayah yang menyimpan sumber daya alam baik darat maupun laut. Sebagai salah satu daerah pertanian, produksi padi tahun 2022 dan 2023 berturut-turut menghasilkan 915.979 ton dan 847.495 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi padi terbesar di wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah produksi ikan tahun 2023 di Kabupaten Bone menurut jenis budidaya perikanan yaitu kolam 1.585 ton, tambak 297.396 ton, dan perairan umum 222.168 ton. Untuk produksi usaha perikanan tambak menurut jenisnya yaitu Udang, kepiting, rumput laut, dan bandeng. Jumlah produksi perikanan penangkapan laut tahun 2023 adalah sebesar 106.054,60 ton atau sebesar 993,709 miliar Rupiah.

#### **3.5. Trend APBD**

Realisasi Pendapatan Daerah Otonomi Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.281.317.725.133,50,-. Kemudian naik menjadi Rp. 2.418.423.535.324,74 pada tahun 2023. Dengan kata lain selama satu tahun realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone meningkat sebesar 6,01 persen. Penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,11 persen, pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Provinsi dan lainnya sebesar 87,53 persen, kemudian pendapatan lain-lain sebesar 2,35 persen. Selanjutnya berdasarkan realisasi pengeluaran daerah otonomi Kabupaten Bone, maka realisasai belanja tahun 2023 sebesar Rp. 2.313.850.852.227,87,-.

# **BAB 4**

## **KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA**

<https://bomkpb.bpp.go.id>



# BAB IV

## Kinerja Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Konsep pembangunan manusia memandang manusia bukan hanya sebagai alat pembangunan namun sebagai tujuan akhir dari pembangunan, atau dengan kata lain manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Fokus utama dari pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi juga diyakini akan menjadi lebih baik.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angka IPM dijadikan sebuah dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) suatu daerah. Indeks ini dapat memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

## 4.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

### 4.1.1. Indeks Kesehatan

Telah dijelaskan pada bab metodologi bahwa ukuran kesehatan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bone tahun 2020 hingga tahun 2023 terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 72,39, tahun 2021 sebesar 72,54, dan tahun 2022 sebesar 72,91. Adapun, UHH Kabupaten Bone tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu naik menjadi 73,20. UHH untuk Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir juga terus menunjukkan adanya peningkatan. UHH Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 hingga tahun 2023 berturut-turut yaitu sebagai berikut ; 73,02; 73,11; 73,40; 73,63.

Besar kecilnya UHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*time lag*) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Indeks kesehatan Kabupaten Bone pada tahun 2020 hingga 2022 secara berturut-turut sebesar 80,06; 80,83; 81,40;. Kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 81,85. Data tersebut menunjukkan perubahan yang relatif kecil, tetapi tetap mengindikasikan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan yang telah dibangun pemerintah bersama masyarakat pada beberapa tahun terakhir menuju ke arah yang lebih baik.

Peningkatan indeks kesehatan bergerak di bawah 1 poin per tahun (12 bulan). Untuk meningkatkan satu poin umur harapan hidup atau angka harapan hidup, maka dalam satu tahun tidak terdapat satu orangpun meninggal dalam suatu wilayah. Kemungkinan ini sangat sulit terjadi, apalagi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi masyarakat yang berada pada negara berkembang. Diantara faktor tersebut yaitu faktor geografis, kondisi sosial masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal yang paling memungkinkan untuk meminimalkan resiko kematian adalah dengan cara memperbaiki berbagai faktor pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meminimalkan angka kematian bayi (AKB), menurunkan angka kematian ibu dan menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, tetap diperlukan kerja keras di bidang kesehatan, terutama bagi pihak-pihak terkait untuk konsisten mengupayakan perbaikan disegala bidang, terutama perbaikan sarana dan prasarana kesehatan.

#### **4.1.2. Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan dihitung dari dua indikator komponen. Komponen yang pertama yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak yang berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bone masih di bawah rata-rata HLS Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir angka HLS Kabupaten Bone terus menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2020 HLS penduduk usia 7 tahun ke atas yang merupakan variabel dalam penghitungan IPM tercatat sekitar 12,88 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,98 tahun dan pada tahun 2021 angka HLS

terus naik menjadi 12,99 tahun. Kemudian, pada tahun 2023, angka HLS sebesar 13,00. Sementara untuk HLS Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berturut-turut sebesar 13,45; 13,52; dan 13,53 tahun. Sedangkan, pada tahun 2023 HLS Provinsi Sulawesi Selatan meningkat menjadi 13,54 tahun.

Komponen kedua dalam penghitungan indeks pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka ini diperoleh dari penduduk yang berusia 25 tahun keatas. RLS Kabupaten Bone masih tergolong rendah. Pada tahun 2020 sebesar 7,15 tahun, tahun 2021 sebesar 7,23 tahun, tahun 2022 sebesar 7,36 tahun. Sedangkan, pada tahun 2023 sebesar 7,54 tahun. Hal Ini berarti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bone hampir menyelesaikan kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berturut-turut sebesar 8,38 tahun, 8,46 tahun, dan 8,63. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 8,76 tahun.

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Harapan lama Sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*). Komponen pendidikan dalam IPM juga terbilang sulit untuk meningkat satu poin dalam kurun hanya satu tahun. Hal tersebut karena hasil pembangunan pendidikan tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, penghitungan lamanya orang bersekolah atau rata-rata lama bersekolah satuannya adalah tahun. Begitu juga dengan Harapan lama Sekolah pada titik tertentu yang telah dicapai, maka peningkatannya akan terlihat bergerak cukup lambat. Indeks Pendidikan di Kabupaten Bone pada tahun 2020, 2021 dan 2022 secara berturut-turut sebesar 59,61; 60,16; 60,62 dan pada tahun 2023 sebesar 61,24.

#### 4.1.2. Indeks Paritas Daya Beli

Indeks paritas daya beli berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan, karena komponen kemampuan daya beli lebih mudah ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan IPM. Secara teori bahkan dapat berkali-kali ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hanya saja pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan pendapatan. Faktor lain yang mempengaruhi daya beli adalah inflasi, apabila inflasi naik maka daya beli masyarakat akan menurun.

Daya beli penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berturut-turut sebesar Rp 8.963.000, Rp 9.030.000., dan Rp9.277.000. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 9.682.000. Untuk indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2020, 2021, dan 2022 secara berturut-turut sebesar 66,79; 67,02; 67,84. Sedangkan pada tahun 2023, indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone mencapai 69,15.

#### 4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan hanya diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ini merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.



**Tabel 4.1 Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023**

Kabupaten/Kota (terdekat)	2020		2021		2022		2023	
	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank	IPM	Rank
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gowa	71,58	10	71,74	15	72,44	13	73,01	15
Sinjai	69,86	17	70,02	19	70,60	19	71,20	20
Maros	71,77	9	72,32	9	72,92	9	73,56	10
Pangkajene Kepulauan	71,31	15	71,81	14	72,41	15	73,23	14
Barru	72,43	8	72,56	8	72,96	8	73,80	8
<b>Bone</b>	<b>68,46</b>	<b>23</b>	<b>68,81</b>	<b>23</b>	<b>69,43</b>	<b>23</b>	<b>70,25</b>	<b>23</b>
Soppeng	70,01	16	70,33	16	71,05	16	71,94	16
Wajo	71,57	12	72,05	10	72,69	11	73,56	11
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>73,08</b>	<b>...</b>	<b>73,38</b>	<b>...</b>	<b>73,96</b>	<b>...</b>	<b>74,60</b>	<b>...</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Keterangan : Ranking IPM berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone pada tahun 2020 sekitar 68,46 berdasarkan peringkatnya menduduki urutan 23 dari 24 kabupaten/kota. Namun seiring dengan meningkatnya beberapa komponen pendukungnya, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 IPM Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan yaitu secara berturut-turut menjadi 68,81; 69,43; dan 70,25 akan tetapi peringkatnya tetap tidak berubah yaitu pada posisi 23 di Sulawesi Selatan. Meskipun peringkat IPM Kabupaten Bone tidak berubah, bukan berarti bahwa Kabupaten Bone tidak mengalami peningkatan, terjadi pertumbuhan IPM sebesar 1,17 yang merupakan pertumbuhan IPM terbesar peringkat 9 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 60 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai  $60 \leq \text{IPM} < 70$  digolongkan sedang,  $70 \leq \text{IPM} < 80$  digolongkan tinggi dan nilai  $\text{IPM} \geq 80$  digolongkan sangat tinggi. Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Bone pada tahun 2023 sebesar

70,25 tergolong dalam kategori tinggi.

Tiga peringkat tertinggi IPM kabupaten/kota tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu masing-masing pada tiga kota, yaitu Makassar, Palopo dan Parepare. Untuk kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dan Bone. Angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 74,60. Secara keseluruhan, IPM 24 Kabupaten/kota termasuk Provinsi Sulawesi Selatan semuanya masih didominasi dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk kabupaten-kabupaten yang terdekat dalam hal jarak dengan Kabupaten Bone, angka IPM yang tertinggi adalah Kabupaten Barru yaitu sebesar 73,80.

**Tabel 4.1 IPM Kabupaten Bone Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023**

Komponen (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,39	72,54	72,91	73,20
<b>Pengetahuan</b>					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	12,98	12,99	13,00
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,15	7,23	7,36	7,54
<b>Standar Hidup Layak</b>					
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	8.963	9.030	9.277	9.682
<b>IPM</b>		<b>68,46</b>	<b>68,81</b>	<b>69,43</b>	<b>70,25</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan



# **BAB 5**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**



# BAB V

## Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan data diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komponen indeks pembangunan manusia 2023 yaitu indeks kesehatan sebesar 81,85; indeks pendidikan 61,24 dan indeks pengeluaran 69,15.
2. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 69,43 naik menjadi 70,25 pada tahun 2023 dan tetap pada posisi ke-23 se-Sulawesi Selatan.
3. Pola penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan sangat berbeda di daerah pedesaan. Penyerapan tenagakerja di perkotaan paling banyak di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan di daerah pedesaan paling banyak di sektor pertanian.
4. Berdasarkan status pekerjaan, maka pekerja di perkotaan lebih banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai dan di pedesaan lebih banyak sebagai pekerja keluarga.

## 5.2. Saran

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas, disarankan beberapa hal antara lain:

1. Program di bidang pendidikan masih tetap dibutuhkan program pendidikan gratis, program pengembelian yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.
2. Potensi daerah Kabupaten Bone masih bertumpu pada sektor pertanian, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas setiap komoditas andalan. Selain itu, juga perlu meningkatkan potensi lain seperti obyek wisata dan perdagangan.
3. Diperlukan perbaikan infrastruktur dan kewirausahaan kepada masyarakat yang mempunyai hasrat untuk membuka usaha, serta tetap mempertahankan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha.

# DAFTAR PUSTAKA

<https://buku.kalbe5.go.id>



<https://bonekab.bps.go.id>

## Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Bone. 2023. “Berita Resmi Statistik.” BPS Kabupaten Bone. Desember 12. Diakses April 2, 2024. <https://bonekab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/21/128/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-bone-2023.html>.
- , 2024. “Berita Resmi Statistik.” BPS Kabupaten Bone. Maret 1. Diakses April 2, 2024. <https://bonekab.bps.go.id/pressrelease/2024/03/01/133/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-bone-tahun-2023-mencapai-3-77-persen-.html>
- , 2024. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BONE MENURUT LAPANGAN USAHA 2019-2023. Watampone: BPS Kabupaten Bone.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BONE**

Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No.4, Watampone, Telp. (0481) 21054

Fax. (0481) 25220; Email: [bps7311@bps.go.id](mailto:bps7311@bps.go.id) Homepage: [www.bonekab.bps.go.id](http://www.bonekab.bps.go.id)